

Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan Zaman: Analisis Sosiologi Pendidikan terhadap Transformasi Sistem Pendidikan di Indonesia

Nurhidayah

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : Nurhidayahbelajar18@gmail.com

Nursyirwan

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : nursyirwan.cg@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze government policies in responding to contemporary developments and their implications for the transformation of Indonesia's education system from the perspective of the sociology of education. The study employed a qualitative descriptive approach through the observation of social phenomena and a literature review of educational policies and relevant academic sources. The findings indicate that educational policy transformation has encouraged a more adaptive, student-centered, and technology-based learning paradigm. However, its implementation continues to face challenges, including unequal access to education, disparities in digital infrastructure, and varying levels of readiness among teachers and educational institutions. From the perspective of the sociology of education, this transformation reflects the role of education as an agent of social change that requires collaboration among the government, schools, families, and communities to achieve an inclusive, high-quality, and equitable education system.

Keywords: Government Policy, Educational Transformation, Sociology of Education, Changing Times, Indonesian Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah dalam menghadapi perkembangan zaman serta implikasinya terhadap transformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan fenomena sosial dan studi kepustakaan terhadap berbagai kebijakan pendidikan serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan pendidikan telah mendorong perubahan paradigma pembelajaran yang lebih adaptif, berpusat

pada peserta didik, dan memanfaatkan teknologi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan infrastruktur digital, serta perbedaan kesiapan pendidik dan satuan pendidikan. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, transformasi tersebut mencerminkan upaya pendidikan sebagai agen perubahan sosial yang memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Transformasi Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, Perkembangan Zaman, Pendidikan Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Di era perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, globalisasi, serta perubahan kebutuhan dunia kerja, sistem pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial serta mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (Ayyin Nayyirrotul Ummah, 2026)

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kebijakan pendidikan, seperti penyempurnaan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan karakter. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai fenomena sosial, seperti kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, perbedaan kesiapan sekolah dan pendidik dalam menerapkan kebijakan, serta kesenjangan literasi digital di kalangan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. (Ayyin Nayyirotul Ummah, 2026)

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pendidikan dipandang sebagai institusi sosial yang berfungsi membentuk karakter, mentransmisikan nilai-nilai, serta mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu dianalisis tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengamatan terhadap fenomena sosial dan studi kepustakaan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi perkembangan zaman memengaruhi transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Melalui analisis tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berorientasi pada pengamatan fenomena sosial. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan pemerintah, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis

isi (*content analysis*) dan interpretasi berdasarkan perspektif sosiologi pendidikan. Fokus penelitian diarahkan pada fenomena perubahan kebijakan pendidikan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan pendidikan dan dinamika sosial secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi bekerja secara terpadu untuk menghasilkan proses pendidikan yang efektif. Menurut Dahniar (2022), pendidikan sebagai suatu sistem tersusun atas unsur-unsur yang saling berinteraksi, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh keterpaduan setiap komponen yang ada. (Dahniar, 2021) Pendapat tersebut sejalan dengan Handayani, Akbar, dan Septia (2025) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan merupakan suatu mekanisme yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari tujuan, peserta didik, pendidik, kurikulum, hingga evaluasi pendidikan. (Akbar & Septia, 2025)

Komponen pertama dalam sistem pendidikan adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi dasar sekaligus arah dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pendidikan. Setiap kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem penilaian dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh komponen lain agar berjalan secara terarah dan terpadu. Dahniar (2022) menjelaskan bahwa

tujuan pendidikan merupakan komponen fundamental yang menentukan arah pengembangan seluruh proses pendidikan. Tanpa tujuan yang jelas, sistem pendidikan akan kehilangan orientasi dalam membentuk peserta didik sesuai dengan harapan masyarakat dan negara. (Dahniar, 2021)

Komponen berikutnya adalah peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan. Peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui proses pembelajaran yang terencana. Dalam paradigma pendidikan modern, peserta didik tidak lagi dipandang sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan sebagai individu yang aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Menurut Handayani et al. (2025), seluruh komponen pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan demikian, karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. (Akbar & Septia, 2025)

Selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang berperan sebagai pelaksana sekaligus pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pendidik bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, membimbing, dan mengevaluasi proses pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan administrasi, layanan akademik, dan penyediaan berbagai fasilitas pendukung. Dahniar (2022) menjelaskan bahwa kualitas pendidik sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran karena pendidik berfungsi sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi peserta didik. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. (Dahniar, 2021)

Komponen yang tidak kalah penting adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Anazah et al. (2025) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan komponen inti dalam sistem pendidikan karena menjadi penghubung antara tujuan pendidikan dengan praktik pembelajaran di kelas. (Sofyan Iskandar, Anazah, Kinanti Dilla Putri, 2025)

Komponen berikutnya adalah proses pembelajaran, yaitu kegiatan interaksi antara pendidik, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Proses pembelajaran merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan karena melalui kegiatan inilah tujuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan mampu memecahkan masalah.

Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Sarana dan prasarana meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang berlangsungnya proses pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada peserta didik. Hazimah et al. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran karena mampu mendukung pelaksanaan kurikulum secara optimal. (Hazimah et al., 2022)

Komponen terakhir adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik maupun efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan terhadap kurikulum, metode pembelajaran, maupun kebijakan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta evaluasi pendidikan. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki satu komponen saja, melainkan harus dilakukan melalui penguatan seluruh komponen sistem pendidikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Transformasi dan Kebijakan Pemerintah sebagai Respon terhadap perkembangan zaman

Perkembangan zaman telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan, berinteraksi, dan bekerja. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan transformasi kebijakan agar sistem pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

Transformasi kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menghadapi perubahan sosial. Perubahan kurikulum,

penerapan pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kompetensi guru merupakan bentuk penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk peserta didik yang adaptif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi persaingan global. (Syawaladi, 2025)

Meskipun demikian, transformasi kebijakan memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Perubahan sistem pembelajaran menuntut sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua untuk menyesuaikan diri dengan paradigma pendidikan yang baru. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam menyediakan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Analisis Transformasi Pendidikan dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang berfungsi membentuk kepribadian individu, mentransmisikan nilai-nilai budaya, serta mempersiapkan anggota masyarakat agar mampu menjalankan peran sosialnya. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pendidikan pada hakikatnya merupakan bentuk respons terhadap perubahan struktur sosial yang terjadi di masyarakat.

1. Perspektif Fungsionalisme

Teori fungsionalisme memandang bahwa pendidikan memiliki fungsi mempertahankan keteraturan sosial melalui proses sosialisasi dan pembentukan kompetensi individu. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan kompetensi, karakter, dan literasi digital menunjukkan upaya menyesuaikan fungsi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendidikan diarahkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara

akademik, tetapi juga memiliki kemampuan bekerja sama, berpikir kritis, dan beradaptasi terhadap perubahan.(Saputra et al., 2025)

2. Perspektif Teori Konflik

Berbeda dengan teori fungsionalisme, teori konflik memandang bahwa pendidikan berpotensi memperkuat ketimpangan sosial apabila akses terhadap pendidikan berkualitas tidak dapat dinikmati secara merata.(Saputra et al., 2025)

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dengan sekolah di daerah terpencil. Sekolah yang memiliki fasilitas teknologi lebih lengkap cenderung lebih mudah mengimplementasikan kebijakan digitalisasi dibandingkan sekolah yang memiliki keterbatasan sarana. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga memengaruhi kesempatan peserta didik dalam mengakses pembelajaran berbasis teknologi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar.

3. Perspektif Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolik menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pendidikan. Perubahan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi mengubah pola komunikasi antara guru dan peserta didik. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sumber.(Peni Marginingsih, Ari Suci Pratiwi, Rika Noor Laila, Puji Mulyani, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, interaksi sosial secara langsung mengalami perubahan sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang tetap

mampu membangun hubungan sosial, kerja sama, dan pembentukan karakter peserta didik.

4. Fenomena Sosial dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan melahirkan berbagai fenomena sosial yang saling berkaitan. Di satu sisi, perkembangan teknologi telah memperluas akses terhadap sumber belajar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Peserta didik memiliki kesempatan memperoleh informasi dari berbagai media digital, sedangkan guru dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif melalui pemanfaatan teknologi. (Peni Marginingsih, Ari Suci Pratiwi, Rika Noor Laila, Puji Mulyani, 2024)

Di sisi lain, transformasi pendidikan juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta perbedaan kemampuan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diikuti oleh kesiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia, sehingga efektivitas implementasi kebijakan menjadi berbeda-beda pada setiap daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, lingkungan, serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu, transformasi pendidikan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

5. Implikasi Kebijakan terhadap Transformasi Sistem Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik,

pemanfaatan teknologi semakin meningkat, dan kompetensi abad ke-21 mulai menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mendorong perubahan paradigma pendidikan dari pembelajaran yang berorientasi pada hafalan menuju pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi. (Azis, 2024)

Namun demikian, keberhasilan transformasi pendidikan memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dari perspektif sosiologi pendidikan, transformasi pendidikan akan berjalan efektif apabila seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan sosial, memperkuat mobilitas sosial, dan membangun masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menghadapi perkembangan zaman merupakan bentuk respons terhadap perubahan sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Transformasi sistem pendidikan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti pembaruan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan karakter. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik agar mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Ditinjau dari perspektif sosiologi pendidikan, transformasi sistem pendidikan tidak hanya merupakan perubahan dalam aspek kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi juga merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk karakter, mentransmisikan nilai-nilai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong mobilitas sosial. Namun, implementasi kebijakan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses terhadap teknologi, perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta ketidaksiapan sebagian pendidik dan peserta didik dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pemerataan sumber daya.

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi sistem pendidikan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan disertai dengan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi sistem pendidikan tidak hanya mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, tetapi juga dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. M., & Septia, N. (2025). *Konsep Pendidikan sebagai Suatu Sistem dan Komponen Sistem Pendidikan*. 3.
- Ayyin Nayyirotul Ummah, et al. (2026). *Transformasi Paradigma Kurikulum di Indonesia Dari Kurikulum 1947 Hingga Kurikulum Merdeka : Transformasi Kurikulum sebagai Respon*. 5(2), 507–513.
<https://doi.org/10.54259/diajar.v5i2.7061>
- Azis, F. (2024). *Perubahan Siklus Pendidikan Dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka*. 7–11.
- Dahniar. (2021). *SISTEM PENDIDIKAN, PENDIDIKAN SEBAGAI SISTEM DAN KOMPONEN SERTA INTERPENDENSI ANTAR KOMPONEN PENDIDIKAN*. 7(3), 1–12.
- Hazimah, G. F., Cahyani, S. A., & Azizah, S. N. (2022). *Pengelolaan kurikulum dan sarana prasarana sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran siswa sekolah dasar*. 9(2), 121–129.
- Peni Marginingsih, Ari Suci Pratiwi, Rika Noor Laila, Puji Mulyani, N. E. (2024). *DINAMIKATRANSFORMASIPENDIDIKANDIINDONESIA: ANALISISKRITISKURIKULUM1968 DANKURIKULUM1973 DALAMKONTEKSPEMBANGUNANNASIONAL*. 09.
- Saputra, D. Y., Subroto, D. E., & Bangsa, U. B. (2025). *Problematika sistem pendidikan nasional: analisis kebijakan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka di banten*. 1(1), 19–26.
- Sofyan Iskandar, Anazah, Kinanti Dilla Putri, Y. S. (2025). *ANALISIS KETERKAITAN KOMPONEN KURIKULUM SEBAGAI SISTEM DALAM KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR*. 10, 233–242.
- Syawaldi, R. A. (2025). *REVOLUSI PARADIGMATIK DALAM INOVASI KURIKULUM: ANALISIS THOMAS KUHN TERHADAP TRANSISI KURIKULUM 2013, KURIKULUM MERDEKA, DAN KURIKULUM CINTA*. 6(November), 2842–2861.